

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas**

##### **1. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap mengenai aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika

berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai: (a) Bukti kompetensi mengemudi; (b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan (c) Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Adapun jenis SIM yang terdapat di Indonesia adalah SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 80 dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun belajar sendiri. Disebutkan dalam pasal 81 dijelaskan mengenai persyaratan seseorang untuk mendapatkan SIM sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- b. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
  - 2) Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
  - 3) Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

- c. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
  - 2) Pengisian formulir permohonan; dan
  - 3) Rumusan sidik jari.
- d. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
  - 2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- e. Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Ujian teori.
  - 2) Ujian praktik; dan/atau.
  - 3) Ujian keterampilan melalui simulator.
- f. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- 1) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
  - 2) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum

pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam aturan pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

## 2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pengendara Kendaraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di atur pada bab XX mengenai ketentuan pidana terdiri dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman ringan sampai hukuman maksimal.

Pasal 278 jenis pelanggaran tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ancaman hukuman Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280 dengan jenis pelanggaran Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pasal 281 Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak memiliki Surat

Izin Mengemudi. Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada pasal 285 ayat 1 disebutkan Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (1) disebutkan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pasal 288 Ayat (2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. Pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289 disebutkan mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pasal 291 ayat 1 (satu) Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pasal 291 ayat 2 (dua) Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pada pasal 293 ayat 1 (satu) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) disebutkan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Pasal 294 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 310 ayat 1 (satu) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada ayat 3 (tiga) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 4 (empat) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur

Pengendara motor di bawah umur ini merupakan para remaja yang umurnya masih di bawah 17 tahun. Sehingga dalam berkendara sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam berkendara. Tentu saja banyak faktor penyebab pengendara motor di bawah umur. Mengutip

temuan penelitian Asdar<sup>14</sup> yang menyebut ada beberapa faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM antara lain:

- a. Tidak adanya sanksi tegas dari kepolisian seperti penilangan dan sanksi.
- b. Orang tua mengizinkan dan memfasilitasi anak untuk berkendara sepeda motor walaupun tidak dilengkapi dengan sim.
- c. Kebiasaan masyarakat membiarkan atau tidak peduli dengan pelanggaran lalu lintas seperti anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor.
- d. Kondisi lingkungan sekitar membuat anak di bawah umur mengemudikan sepeda motor.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur menurut Asri Nurlia,dkk.<sup>15</sup> terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yaitu kebutuhan pribadi, lebih ekonomis, lebih efisien, serta faktor dari orang tua atau keluarga yang membiarkan anak mereka menggunakan motor.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur dapat diidentifikasi diantaranya karena kebutuhan pribadi, lebih ekonomis, lebih efisien, serta faktor dari orang tua atau keluarga yang membiarkan anak mereka menggunakan motor.

## **B. Tinjauan Mengenai Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan definisi mengenai anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua

<sup>14</sup> Muhammad Asdar, et.al. 2013. Perilaku Safety Riding pada Siswa SMA di Kabupaten Pangkep. [Online]. [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4246/MUHAMMAD%20ASDAR\\_K11109367.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4246/MUHAMMAD%20ASDAR_K11109367.pdf?sequence=1) diakses 8 Juli 2019.

<sup>15</sup>Dewi Asri Nurlia, Siti Komariah, Bagja Waluya. 2017. *Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*. Jurnal Sosietas.vol.7 No.2. Hal. 381-385.

ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Disebutkan dalam undang-undang lain yang memiliki definisi mengenai anak yang cukup beragam, definisi mengenai anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam undang-undang ini bermakna bahwa mereka yang berusia dibawah 21 tahun ataupun belum pernah menikah masuk dalam kategori anak-anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam konteks ini maka dapat dimaknai bahwa mereka yang berusia dibawah 18 tahun serta belum pernah menikah masuk dalam kategori anak-anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, membolehkan usia bekerja 15 tahun. Dalam pengertian tersebut bermakna

bahwa mereka yang berusia dibawah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan termasuk dalam kategori anak-anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Yang bermakna bahwa usia dibawah 16 tahun bagi perempuan termasuk dalam kategori anak-anak, sedangkan usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki termasuk dalam kategori anak-anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Beberapa definisi yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan yang ada memiliki keragaman makna dalam mendefinisikan anak, patokan yang lazim digunakan adalah rentang usia anak. Sebagian besar menyebutkan bahwa definisi anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Jika merujuk pada undang-undang pernikahan sendiri disebutkan apabila bagi laki-laki usia minimal menikah adalah 19 tahun sedangkan untuk usia minimal bagi perempuan 16 tahun. Sehingga dapat diambil kesimpulan mereka yang berada dibawah usia tersebut termasuk dalam kategori anak-anak.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile*

*delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*delinquency*” berarti “kejahatan”. Dengan demikian “*juvenile delinquency*” adalah “kejahatan anak”, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.<sup>16</sup>

Pendapat selanjutnya dikutip dari Romli Atmasasmita dalam Soetodjo yang mendefinisikan *juvenile delinquency* merujuk pada 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).<sup>18</sup> Pidana anak sendiri dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 45 yang menyebutkann secara rinci yaitu “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan

<sup>16</sup>Setiady, Tholib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h.. 176.

<sup>17</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.11..

<sup>18</sup> Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 176.

kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”<sup>19</sup>

Ditelusuri lebih lanjut mengenai pidana anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan pada pasal satu, yang dimaksud dengan anak nakal adalah: “Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan hal tersebut terlalu berlebihan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>20</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak apakah bisa dijatuhi hukuman, maka mengutip pendapat Roeslan Saleh yang menyebut dipidana atau

<sup>19</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2013. Surabaya. Kesindo Utama. Hal.23.

<sup>20</sup>Wagiati Soetedjo. 2010.*Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. Hal. 87.

tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.<sup>21</sup> Maka terkait kondisi tersebut hakim dapat melakukan dua tahap sebagai berikut:

- a. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- b. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.<sup>22</sup>

Mengutip pendapat Marlina yang menyatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan, akan tetapi pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini

---

<sup>21</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 69.

<sup>22</sup> Ibid.

disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>23</sup>

Apabila mengutip pendapat Wahyudi yang memberikan penjelasan terkait penjatuhan sanksi kepada anak, perlu mempertimbangkan beberapa hal yang dipaparkan sebagai berikut:

- a. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih meragukan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi yang tidak dikenakan.
- c. Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.<sup>24</sup>

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan dalam peradilan anak adalah jenis-jenis pidana yang berbeda dengan jenis pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP. Disebutkan dalam Pasal 10 KUHP jenis hukuman mencakup:

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Setya Wahyudi. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal. 53.



a. Hukuman pokok:

- 1) Hukuman Mati.
- 2) Hukuman Penjara.
- 3) Hukuman Kurungan.
- 4) Hukuman Denda.

b. Hukuman tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

### C. Juvenile Delinquency

Menurut Kartini Kartono bahwa *juvenile delinquency* merupakan perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>25</sup> Pendapat lain menurut Setyonegoro mendefinisikan *delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu.<sup>26</sup> Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika individu berusia *adolescent* atau pre-

<sup>25</sup>Kartini Kartono. 2011. *Patologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 89.

<sup>26</sup> John W. Santrock. 2011. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Terj. Adelar dan Saragih. Jakarta. Erlangga. Hal. 519.

*adolescent* maka tingkah laku itu sering kali disebut *delinquent (delinquent behavior)*; dan jika anak sudah dewasa, maka tingkah laku anak sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal bahaviour*).<sup>27</sup> Selanjutnya menurut Walgito *juvenile delinquency* sebagai mencakup setiap perbuatan. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum.<sup>28</sup>

*Delinquency* sifatnya bisa organisemis atau fisiologis, bisa psikis, interpersonal, antarpersonal dan kultural. Kenakalan remaja tidak pernah berlangsung dalam isolasi, yaitu unik khas satu-satunya dalam jenisnya, dan tidak berproses dalam ruang vakum; tetapi selalu berlangsung antarpersonal dan sosio-kultural.<sup>29</sup> Faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan *juvenile delinquency* dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor massmedia, faktor milieu yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Faktor keluarga yang dapat berpengaruh seperti rumah tangga berantakan, perlindungan berlebihan dari orang tua, penolakan orang tua, pengaruh buruk dari orang tua.<sup>30</sup>

##### a. Rumah tangga berantakan

Bila rumah tangga dimulai adanya konflik dan itu terjadi terus menerus, maka akan mengalami perceraian, dan anak akan mengalami kebingungan dan kesulitan komunikasi terhadap anggota keluarganya, kemudian banyak konflik batin dan

<sup>27</sup>Marwan Setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Galia Indonesia. Hal.100.

<sup>28</sup> Sudarsono.2012. *Kenakalan Remaja* . Jakarta: Rineka Cipta. Hal.11.

<sup>29</sup> Kartini Kartono. 2012.*Kenakalan Remaja*.Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal. 46.

<sup>30</sup>Kartini Kartono. 2017.*Kenakalan Remaja*.Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal.126.

kegalauan jiwa. Anak tidak bisa belajar dengan tenang, tidak betah tinggal dirumah.

b. Perlindungan lebih dari orang tua

Anak akan mudah rapuh dan tidak bisa mandiri selalu menggantungkan bantuan orang tua itu disebabkan karena orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya dan tidak pernah menghindarkan dari kesulitan-kesulitan dalam menghadapi hidupnya.

c. Penolakan orang tua

Orang tua yang tidak bisa memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu karena mereka ingin melanjutkan kebiasaan sebelum menikah hal ini disebut *maladjustment* yakni tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi hidup baru. Mereka menganggap anak sebagai beban untuk kelanjutan kariernya, kondisi tersebut menyebabkan tekanan dalam batin dan menimbulkan konflik.

d. Pengaruh buruk dari orang tua

Suasana rumah yang kacau yang mementingkan egoisnya sendiri-sendiri, tidak ada sifat yang saling menyayangi, menghormati, secara otomatis kebiasaan dan tingkah laku yang buruk dari orang tua itu akan dilakukan oleh anak-anak ketika mereka bergaul dengan teman-temannya.

2. Faktor pergaulan

Menurut Sheldon dan Eleanor Clueck dalam Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah berhubungan dengan “*band companions*” dan “*badhabit*” atau lebih banyak dikenal dengan istilah “teman buruk dan tempat buruk.”

3. Faktor massmedia

Masmedia sangat mempengaruhi anak-anak muda, karena merekamasih mudah terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Adanya teknologi internet memudahkan tumbuhnya media digital makin mudah diakses dengan segala isinya yang dapat mempengaruhi aktifitas anak.

4. Faktor millieu

Pendidikan serta perkembangan anak tidak selalu diuntungkan dari lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak yang tidak baik dan anti sosial, hal ini juga akan menimbulkan emosional yang buruk pada anak-anak puber yang masih labil jiwanya.<sup>31</sup>

## D. Teori Kriminologi

Menurut Sutherland menguraikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.

<sup>31</sup> Kartini Kartono.2017.*Kenakalan Remaja*.Jakarta. RajaGrafindo Persada.Hal.126.

Kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>32</sup> Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>33</sup> Sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan utama yaitu teori kriminologi konvensional dan teori kriminologi modern yang diuraikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Teori kriminologi konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

<sup>32</sup>Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books. Hal. 2.

<sup>33</sup>Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books. Hal. 1.

<sup>34</sup>Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal. 97.

- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

## 2. Teori kriminologi modern

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

- o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

#### E. Penanggulangan Kejahatan Penal dan Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah (*political criminal*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.<sup>35</sup>

Menurut Muladi dan Arief yang menyebut penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief.2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu. Jakarta. Prenada Media Group. Hal.39-40.

tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *olderphilosophy of crime control*.<sup>36</sup> Tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana yaitu (1) perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. (2) Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. (3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>37</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha

---

<sup>36</sup> Nawawi Arief.2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 23.

<sup>37</sup>Nawawi Arief.2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal . 78.



non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminalitas keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

#### **F. Tugas dan Fungsi Polisi Dibidang Lalu Lintas**

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi lalu lintas merupakan salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi sembilan hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas polri secara gabungan dengan melaksanakan operasi kepolisian.

## **G. Kajian Terdahulu**

Studi terdahulu yang telah dilakukan dengan tema yang sama mengenai pelanggaran lalu lintas, anak dibawah umur, kecelakaan, dan pidana pada anak berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Tamin dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat yang Mengakibatkan Kematian.” Kesimpulan penelitian tersebut menjelaskan seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas berat mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas berat berupa penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi seorang anak terdiri dari pidana pokok yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pidana penjara dan pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana penjara bagi seorang anak dalam kecelakaan lalu lintas berat disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam kecelakaan lalu lintas berat. Bagi seorang anak, tuntutan sanksi pidana penjara dikurangi  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari tuntutan sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seperti pada kasus yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta, dimana pelaku (anak) dihukum dua tahun penjara.<sup>38</sup>

Penelitian Sadono dengan judul “Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung.” Penelitian tersebut menyimpulkan Pengalaman berlalu-lintas di Kota Bandung masih terdapat pelanggaran seperti pelanggaran marka jalan, tidak menggunakan helm, modifikasi kenalpot, pelepasan spion, pelepasan badan motor, menyalip dari kiri jalan dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena sikap pengendara roda dua selama berkendara masih muncul sikap yang negatif seperti sikap penerabas, hipokrit, ketidakjujuran, dan *membeo*. Dalam rangka meminimalisir pelanggaran tersebut, pengguna kendaraan roda dua mengharapkan kepada petugas yang berwenang untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggar, terus memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana berkendara yang baik, dan proaktif dalam membatasi jumlah kendaraan roda dua yang beredar di masyarakat baik itu berupa kendaraan roda dua yang bodong maupun kendaraan roda dua yang tidak laik guna, dan petugas terus dituntut proaktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang berkendara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>39</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ramona dengan judul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>38</sup> Arnoldus Yanssen Paiton Tamin. 2014. *PertanggungJawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

<sup>39</sup> Soni Sadono. 2016. *Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*. Jurnal Channel. Vol.4 (1) ;61-79

Angkutan Jalan dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berjalan Lintas di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya dikalangan remaja. Masih banyak pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh remaja, sehingga banyak usia remaja yang menjadi korban dan penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor yaitu: kurangnya kesadaran pengemudi untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, mengaplikasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, serta ugal-ugalan di jalan khususnya kaum remaja. Adapun faktor yang menjadi penghambat efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009, yaitu penggunaan kendaraan oleh anak sekolah mereka rata-rata belum cukup usia dalam mengambil Surat Ijin Mengemudi (SIM), sementara untuk praktis sekolahnya mereka lebih praktis untuk membawa kendaraan sendiri dibanding menggunakan angkutan umum, struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelekan sesuatu hal, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu masih sangat minim. Langkah yang dapat dilakukan agar anak remaja memahami pentingnya akan kesadaran berjalan lintas yaitu, Perlu adanya sosialisasi bahwa anak yang belum mempunyai SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor mengingat kondisi psikologis dan mental

mereka yang belum stabil untuk menghadapi kejadian di jalanan serta belum terampilnya dalam menjalankan kendaraannya.<sup>40</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan Puri dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten.” Kesimpulan penelitian tersebut menyebut upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten, antara lain adalah: (a) Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan. (b) Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi), program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” (*police go to campus, traffic board*) dan operasi khusus kepolisian. Sedangkan secara edukatif seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan

---

<sup>40</sup>R.A Ekie Prifitriani Ramona. 2014. Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros.



sekolah dilakukan pelajar, pelatihan *safety riding*, dan tegasnya tindakan penegakan hukum polisi untuk edukasi terwujudnya kepastian hukum.<sup>41</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Pardidinata dan Swardhana dengan judul “Penerapan Pidana Denda dalam Menekankan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja.” Penelitian tersebut memberikan kesimpulan (a) Sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana efektifitas penerapan pidana denda dalam menekan angka pelanggaran belumlah efektif. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kepada pelanggar lalu lintas sehingga para pelanggar lalu lintas merasa mampu untuk membayar sanksi denda yang diberikan serta pengawasan dari petugas lalu lintas tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang diawasi sehingga menyebabkan tidak merata dan lemahnya pengawasan terhadap para pelanggar. (b) Faktor yang menjadi kendala terhadap penerapan pidana denda adalah dari faktor substansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggarnya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda

---

<sup>41</sup> Prasasti Artika Puri. 2013. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas.<sup>42</sup>

Penelitian selanjutnya dari Arifah dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg).” Kesimpulan penelitian tersebut penyelesaian perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dan bentuk perlindungannya sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap *recidive* anak sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, alasan yuridis dan nonyuridis, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hambatan yang dialami oleh hakim yaitu kurangnya fasilitas untuk anak, kurangnya koordinasi yang lebih baik di Pengadilan Negeri, hal tersebut salah satu hambatan yang dimiliki oleh hakim.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana. 2018. *Penerapan Pidana Denda dalam Menekankan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja*. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara. Vol. 7(2):1-16.

<sup>43</sup> Dewi Arifah. 2015. *Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.